Pengelolaan Satuan Sekolah Umum dan Madrasah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan

Imam Subekti¹⁾, Lias Hasibuan²⁾, Kasful Anwar³⁾, Asniyati⁴⁾

¹STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

E-mail: imamsubekti@stainkepri.ac.id

²UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail: penulis Lhas10@yahoo.co.id

⁴UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail: kasfulanwarus@gmail.com

⁴UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail: penulis asniyati0306@gmail.com

Abstract

This article aims to explore the normative and philosophical rules regarding the management of primary and secondary school units. This departs from the existence of schools that still need important attention, both public schools under the Ministry of Education and madrasahs under the Ministry of Religion. Writing with descriptive analysis method reveals that the rules that discuss this management are contained in the Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Education Management Standards by Primary and Secondary Education Units). The regulation contains several important points that must become the standards of educational institutions, both public schools and madrasahs, namely the existence of good and measurable program planning, effective and efficient work plans, periodic monitoring and evaluation, qualified and credible leadership, system good information in school. But these standards are minimum standards that must be met by every manager of an education unit. Philosophically, the provisions on management in the regulation have also been historically related to the philosophy of modern education management. However, education that has not been evenly distributed is also a challenge in fully implementing the regulation.

Keywords : sekolah, madrasah, akreditasi, mutu pendidikan

Received Juni 24, 2021 Revised Juni 26, 2021 Accepted Juni 28, 2021

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah bagian proses belajar yang akan dijalani jalani oleh manusia, baik secara formal maupun nonformal. Secara formal, pendidikan dapat dimaknai sebagai upaya peningkatan ilmu pengetahuan dalam proses transformasi sehingga mendapatkan kualitas sumber daya yang unggul. (C. Anwar, 2014) Karena itu, pengelola pendidikan formal juga menjadi bagian penting untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan unggul. Di masa kini, pembahasan tentang pengelolaan pendidikan yang baik terus menjadi perbincangan di kalangan pemikir guna mewujudkan insan baik. (Nurochmah dkk., 2019) Dalam konteks pembangunan bangsa dan negara, maka pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan warganya. Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan investasi besar untuk berjuang ke luar dari krisis dan menghadapi dunia global.

Pentingnya pendidikan bagi setiap generasi penerus bangsa, maka setiap negara memiliki kebijakan tersendiri tentang sistem pendidikannya. Secara kelembagaan, pendidikan memiliki sumbangsih yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa dan menjadi wahana serta sarana dalam membangun

karakteristik bangsa ini (*nasional character building*). Masyarakat yang cerdas dan watak kebangsaan yang khas merupakan investasi penting dalam menghadapi krisis global. Selain itu, pendidikan juga merupakan hak setiap warga negara sehingga negara wajib menjamin anak-anak generasi penerus bangsa memiliki pendidikan yang layak. (Baharuddin, 2017) Sebab itu, satuan pendidikan di bagi berdasarkan kelompok ilmu, yang dikenal dengan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas dari satuan pendidikan yang ada. Maka, satuan pendidikan itu juga harus memenuhi standar nasional pendidikan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Sebab, sistem pendidikan dibangun agar mutu dan kualitas pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan mampu memenuhi harapan peningkatan sumber daya manusia itu. Sebagai dasar normatif, mutu adalah suatu nilai yang tidak dapat ditawar oleh setiap satuan pendidikan sehingga apabila mutu pendidikan berkompromikan berdasarkan selera masing-masing pengelola pendidikan, maka hal ini akan berimbas pada rendahnya kualitas pendidikan kita. Maka wajar saja bila ada sebuah adigium yang menyebutkan, *contradiction in terminis* alias “menerima mutu yang tidak bermutu”.(H. Anwar, 2017)

Apabila dilihat dari jenjang, pendidikan dasar dan menengah berada posisi penting dalam sistem pendidikan. Di jenjang ini, anak-anak akan mendapatkan pengetahuan dan budi pekerti untuk membangun karakter mereka. Di usia mereka yang sedang beranjak, tingkah laku mereka juga cukup beragam sehingga tantangan bagi pendidik dan sekolah umumnya, perlu lebih bijaksana menghadapi mereka. Di usia pertumbuhan itu, kalangan murid anak-anak akan banyak meniru apa yang diajarkan oleh gurunya, sedangkan di kalangan remaja mereka mulai akan merealisasikan apa yang terbayang di pikiran mereka untuk mengisi masa remaja mereka. Itulah tantangan nyata dunia pendidikan dasar dan menengah sehingga setiap satuan pendidikan juga memiliki strategi khusus untuk mendidik mereka dengan berlandaskan pada mutu pendidikan yang baik. Kuncinya ialah pengelolaan pendidikan yang baik.(Nurochmah dkk., 2019)

Pengelolaan sekolah merupakan pengelolaan pendidikan pada unit paling bawah. Hak otonom dari pengelolaan ialah untuk merencanakan program pendidikan dan membuat keputusan yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara komprehensif. Hal itu berkaitan dengan kebutuhan sekolah, termasuk visi, misi dan tujuan sekolah itu. Pengelolaan pendidikan juga tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang ada sebagai acuan normatif yang utama dan untuk mencapai tujuan bersama atau standar nasional pendidikan.(H. Anwar, 2017; Nurdin & Sibaweh, 2015)

Pada realitanya, satuan pendidikan yang ada di Indonesia ini terbagi menjadi dua, yakni sekolah umum dan sekolah madrasah. Dua jenis sekolah ini juga berada di bawah kementerian yang berbeda sehingga penerapan dan muatan standarnya bisa saja dipraktikkan berbeda. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara sekolah umum dan madrasah yang ada di Indonesia (Alawiyah, 2014). Meski demikian, dua lembaga itu sangat penting bagi pendidikan di Indonesia dan terbukti telah memberikan sumbangsih dengan mendidik anak-anak Indonesia. Akan tetapi, penting untuk membahas pola pengelolaan dua bentuk sekolah itu sebagai bagian dari upaya untuk menemukan sesuatu yang baru dan bisa menjawab problem dalam dunia pendidikan di Indonesia.(Raharjo dkk., 2018) Selain itu, problem lain juga terjadi antara kualitas pendidikan sekolah dengan akreditasi yang berbeda. Sebagaimana menurut Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian ini hendak membahas tentang sistem pengelolaan satuan pendidikan untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dalam penerapan di sekolah umum dan sekolah madrasah.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini ialah kualitatif, yakni pendekatan dengan berfikir secara induktif (*grounded*). Pendekatan kualitatif tidak dimulai dengan mengajukan hipotesis dan kemudian menguji kebenarannya (berfikir deduktif), melainkan bergerak dari mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuatu. Dari

data itu dicari pola-pola dan prinsip-prinsip. Akhirnya menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Karena itu, walaupun ada hipotesis dalam penelitian kualitatif, hipotesis tersebut tidak diuji untuk diterima atau ditolak. (Moleong, 2007) Sedangkan jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dan sumber pendukung lainnya.

Adapun analisis data menggunakan metode *content analysis*, yakni analisis sesuatu berdasarkan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang berbentuk, teks-teks, tulisan-tulisan dan pendapat-pendapat ahli pendidikan (Moleong, 2007). Metode ini digunakan karena yang fokus bahasanya aturan perundang-undangan sehingga isi dari aturan yang menjadi pembahasan penelitian nantinya akan ditelaah lebih mendalam. Sedangkan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengukur aturan perundang-undangan yang menjadi obyek penelitian ini sesuai dengan fokus pembahasan. Sedangkan pendekatan filosofis, yaitu untuk mengungkap nilai-nilai filosofis yang termuat dalam masing-masing bahasan menggunakan filsafat pendidikan islam

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Standar Nasional Pendidikan

Standar nasional pendidikan ditetapkan melalui beberapa regulasi yang sistematis, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan menteri. Sedangkan pengertian standar nasional pendidikan ialah suatu standar minimal yang harus dimiliki setiap sekolah dalam upaya menjaga mutu pendidikan. Sedangkan tujuan dari Standar Nasional Pendidikan yakni bertujuan menjamin mutu Pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sedangkan tujuan dari Standar Nasional Pendidikan yakni bertujuan menjamin mutu Pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Ada banyak ketentuan standar yang diamanatkan dalam regulasi pendidikan di Indonesia, baik itu standar pengelolaan, sarana, kurikulum, guru dan tenaga pendidikan serta hal lain. Masing-masing standar tersebut menjadi penting dan saling keterkaitan satu sama lain. Dalam penelitian ini, lebih fokus pada standar pengelolaan sebagaimana yang menjadi fokus penelitian. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. (Wardani dkk., 2017) Dalam pasal 1 butir 9 PP nomor 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan. Sedangkan pada pasal 49 juga disebutkan bahwa pengelolaan untuk sekolah dasar dan menengah berlandaskan pada asas kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan agar setiap sekolah dasar dan menengah merumuskan keunggulan masing-masing sehingga memiliki daya saing yang baik. (Mulyasa & Profesional, 2009, hlm. 39)

Muatan dalam aturan terdapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Dapat diartikan pengelolaan pendidikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan.

Terkait dengan standar pengelolaan pendidikan terdapat enam komponen kegiatan penting yang harus dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah, yaitu: 1) Perencanaan Program; 2) Pelaksanaan Rencana Kerja; 3) Pengawasan dan

Evaluasi; 4) Kepemimpinan Sekolah/Madrasah; 5) Sistem Informasi Manajemen; dan 6) Penilaian Khusus. Apabila setiap jenjang pengelola satuan pendidikan berupaya memberi jaminan mutu dan dilakukan secara terstandar berkelanjutan, maka mutu pendidikan Indonesia secara nasional akan meningkat. Peningkatan mutu pendidikan akan berdampak pada mutu sumber daya manusia secara nasional. Untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan pendidikan diperlukan sistem tata pamong (*governance*). Tata pamong yang baik (*good governance*) jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung-jawab, dan adil. (H. Anwar, 2017)

Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Fungsi dari pengelolaan pendidikan mengikuti pada fungsi-fungsi manajemen administrasi pada umumnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengembangan. (Faishal Haq, 2017)

Pertama, perencanaan (*planning*) adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang terakhir merumuskan perencanaan merupakan penetapan pada tindakan apa yang harus dilakukan? Apakah sebab tindakan itu harus dikerjakan? Dimanakah tindakan itu harus dikerjakan? Kapankah tindakan itu harus dikerjakan? Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu? Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu?

Kedua, pengorganisasian (*organizing*) adalah dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang pemimpin, pekerjaan pemimpin meliputi beberapa kegiatan yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara atasan dan bawahan, memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan agar supaya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan.

Ketiga, pengarahan (*directing*) adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Keempat, pengawasan (*controlling*) adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar supaya kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat.

Kelima, pengembangan (*development*) adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan, dengan adanya pengembangan pengelolaan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh.

Sebagai upaya menjaga standar dan mutu pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan akreditasi untuk setiap sekolah. Akreditasi sekolah dilakukan secara berkala (Hanun, 2015). Bagian pengelolaan pendidikan merupakan salah bagian penilaian penting di dalamnya. Berdasarkan instrumen akreditasi, maka terdapat enam komponen penting untuk pengelolaan pendidikan. (Annisa, 2018; BANSM, 2017) Keenam instrumen tersebut yakni:

- (1) Sekolah/Madrasah mendapat kualifikasi A apabila: merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami dan sering disosialisasikan. Sedangkan sekolah akan mendapat kualifikasi B jika merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami dan pernah disosialisasikan;
- (2) Sekolah/Madrasah mendapat kualifikasi A apabila: Sekolah/Madrasah memiliki pedoman yang mengatur tujuh atau lebih aspek pengelolaan secara tertulis.

Sedangkan kualifikasi B jika memiliki pedoman yang mengatur lima atau enam aspek pengelolaan secara tertulis;

- (3) Sekolah/Madrasah mendapat kualifikasi A apabila: Memiliki struktur organisasi yang dipajang di dinding dan disertai uraian tugas yang jelas. Sedangkan kualifikasi B jika memiliki struktur disertai uraian tugas yang jelas;
- (4) Sekolah/Madrasah mendapat kualifikasi A apabila: sebanyak 76%-100% kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan. Sedangkan kualifikasi B sebanyak 51%-75% kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan;
- (5) Sekolah/Madrasah mendapat kualifikasi A apabila: melaksanakan empat atau lebih kegiatan kesiswaan. Sedangkan kualifikasi B jika melaksanakan tiga kegiatan kesiswaan;
- (6) Sekolah/Madrasah mendapat kualifikasi A apabila: melaksanakan empat atau lebih kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Sedangkan kualifikasi B jika melaksanakan tiga kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

Standar dan instrumen penilaian harus menjadi acuan penting bagi pengelola pendidikan agar mutu pendidikan yang diberikan menjadi baik. Sebab itu, dalam konteks pendidikan di Indonesia, terdapat akreditasi bagi sekolah yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengukur standar mutu yang diterapkan oleh sekolah tersebut. Suka atau tidak sudah dengan adanya akreditasi sekolah, setiap pengelola tidak bisa mengelak dari keperluan akreditasi tersebut sebab hal itu menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah sekolah dalam menjaga standar pendidikan yang ditetapkan oleh negara. Namun demikian, perlu juga adanya evaluasi keterlaksanaan standar di setiap sekolah agar peringkat akreditasi yang dimiliki sesuai dengan mutu yang berada di sekolah tersebut. (Wardani dkk., 2017)

b. *Telaah Normatif terhadap Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007*

Sebelum menuju kepada pemaparan standar pengelolaan pendidikan, penting untuk diketahui bahwa dalam pembahasan kali ini adalah difokuskan kepada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang membahas tentang pendidikan dasar dan menengah yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam peraturan tersebut, disebutkan pentingnya standarisasi pendidikan agar mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.

Permendiknas tersebut memuat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dan dipenuhi oleh pengelola satuan pendidikan, di antaranya perencanaan program, perencanaan program kerja, pelaksanaan dan evaluasi. (BNSP, 2007; Komariah & Triatna, 2006) Proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi termasuk yang umum dalam sistem manajemen. Tetapi dalam peraturan tersebut, terdapat kekhususan sesuai dengan rincian yang ada di dalamnya.

Pertama, di bidang perencanaan program. Termasuk dalam bagian ini ialah adanya visi, misi, tujuan dan program kerja dari sekolah dan madrasah. Menurut Permendiknas No 19 Tahun 2007 harus memenuhi lima kriteria, yakni (a) dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, (b) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan, (c) dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional, (d) diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah, (e) disosialisasikan kepada warga

sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan, (f) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Sedangkan untuk misi, dalam Permendiknas No. 19 tahun 2007 disebutkan harus memenuhi 9 kriteria, yakni (a) Memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, (b) Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, (c) menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah, (d) menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah, (e) Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah/madrasah, (f) Memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat, (h) Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah, (i) Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan, (j) Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Sementara, perumusan tujuan menurut Permendiknas No. 19 Tahun 2007 harus memenuhi beberapa kriteria, yakni (a) Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan), (b) Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, (c) Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan pemerintah, (d) Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah, dan (e) Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.

Adapun program merupakan implementasi dari visi, misi dan tujuan. Program yang dimaksudkan dalam makalah ini adalah program operasional. Program operasional didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah atau lebih ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (BNSP, 2007)

Agar operasional Sekolah/Madrasah lebih fokus dan lebih tepat dalam menentukan prioritas-prioritas sekolah/madrasah, maka ditetapkanlah visi sekolah. Visi sekolah merupakan 'tujuan jauh' yang harus dicapai oleh sekolah/madrasah dalam kurun waktu. Oleh karena itu kepala sekolah dengan kemampuan kepemimpinannya harus menyamakan visi setiap komponen. Proses menyamakan visi setiap komponen bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan secara serta merta, namun membutuhkan proses yang bertahap.

Visi harus dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan *stakeholder* potensial dan kegiatan utama lembaga pendidikan. Visi dirumuskan dalam kalimat mudah dipahami dan menunjukkan suatu keadaan sekolah dalam jangka 5-10 tahun. Keadaan dapat diwujudkan dalam ukuran kualitatif. Menurut Sugeng Sulisty Prabowo, penyusunan visi yang baik harus memenuhi sembilan elemen pentingnya, yakni (a) Mengembangkan kepercayaan-kepercayaan, kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan sekolah/madrasah, (b) Sederhana, mudah difahami, lengkap dan mencakup kepentingan bersama, (c) Sejalan dengan visi organisasi di atasnya, misal yayasan, Dinas Pendidikan, (d) Berjangka panjang (5 s/d 10 tahun), (e) Berupa agenda yang kuat bernilai tinggi untuk dicapai, (f) Menggambarkan apa yang diinginkan pada masa yang akan datang, (g) Spesifik hanya khusus untuk sekolah tertentu, (h) Mampu memberikan inspirasi dan (j) Jangan mengansumsikan pada sistem yang sama pada saat ini terbuka

untuk dilakukan pengembangan sesuai dengan organisasi yang ada metodologi, fasilitas dan proses pembelajaran. (Prabowo, 2008)

Visi dan misi merupakan suatu impian yang perlu dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam satu organisasi. Untuk mencapainya, perlu perencanaan yang matang, sebab perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan untuk mencapai tujuan. (Kurniadin dkk., 2013; Nurdin & Sibaweh, 2015) Dalam perspektif Islam, perencanaan yang baik itu akan membuahkan nilai-nilai kebaikan juga. Di antara ayat al-Qur'an yang terkait dengan fungsi perencanaan adalah Surat al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Makna dari ajaran Islam tentang perencanaan ialah perihal membuat sesuatu perencanaan yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Bahkan dalam ayat yang lain, disebutkan agar berlomba-lomba pada kebaikan. Sedangkan pendidikan padasarnya adalah suatu pekerjaan yang baik, untuk mendidik anak-anak menjadi orang berilmu, berakhlak dan tentu juga haru taat pada ajaran agamanya. Sebab itu, dalam perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dengan ukuran yang jelas. Hal inilah yang disebut dengan visi dan misi. Dari visi itu, munculkan suatu perencanaan yang diproyeksikan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Islam mengajarkan agar umatnya belajar dari pengalaman masa lalu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang beruntung adalah orang yang lebih baik dari hari sebelumnya. Maka dari, perlu ada perencanaan matang dalam setiap program sehingga tujuan atau pun impian pengelolaan pendidikan bisa terwujud. Keperluan merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu. Dalam hal ini visi, misi dan tujuan sebuah sekolah haruslah jelas dan memenuhi sebuah syarat sebagaimana pendapat para ahli sebab tugas sekolah sebagai lembaga ialah mendidik agar kelas para murid menjadi manusia yang berguna.

Kedua, pelaksanaan rencana kerja. Hal ini meliputi seluruh bidang pelaksanaan operasional sekolah, meliputi: pedoman sekolah, struktur organisasi sekolah/madrasah, pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekitar, serta peranserta masyarakat dan kemitraan sekolah. Elemen penting dari pelaksanaan program kerja adalah pemangku kepentingan di sekolah dan seluruh perangkatnya. Karena itu, pentingnya satu visi dan misi dari seluruh perangkat sekolah agar bisa melakukan program kerja dengan baik dan sistematis.

Hal lain yang perlu dipersiapkan ialah penetapan struktur. Dalam organisasi diteloh dibuatkan struktur sedemikian rupa dengan garis koordinasi dan instruksi yang jelas agar memudahkan dalam mengimplementasikan kebijakan dan program kerja. Struktur organisasi sekolah terdiri dari semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan yang mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah. (Kurniadin dkk., 2013) Kerja sistematis ini diperlukan agar tidak terjadi over laping ataupun tumpang tindik pekerjaan yang bisa mengakibatkan kerja menjadi tidak efektif dan efisien.

Ketiga, pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Menurut Kurniadin, pengawasan ialah kegiatan yang bertujuan memperoleh kejelasan dan kepastian perihal pelaksanaan program atau kegiatan supaya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Kurniadin dkk., 2013) Titik tekan dari evaluasi ini sendiri ialah upaya pencarian dan pengkombinasian data secara metodologis dengan menitikberatkan pada tujuan yang telah ditetapkan.

Mengenai fungsi pengawasan, Allah SWT., berfirman di dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

Artinya: "Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka."

Beberapa pakar menilai bahwa pengawasan itu sangat penting karena tanpa pengawasan yang baik, kinerja organisasi bisa saja tidak berjalan maksimal. Bahkan, kepemimpinan yang tidak mendapatkan pengawasan yang baik, berpotensi melenceng dari semangat kepemimpinan itu sendiri, yakni menciptakan masalah bagi orang banyak. Mereka menyebut evaluasi sebagai aktivitas untuk mendapatkan kepastian serta pengkombinasian data tentang pelaksanaan program dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Data pengkombinasian dari pelaksanaan program dengan tujuan akan diperoleh informasi numerik dan komparatif. Di sinilah pentingnya pengawasan dan evaluasi dalam bentuk program pengawasan dan akreditasi dilakukan pada sekolah/madrasah.

Sekolah harus objektif, bertanggungjawab dan berkelanjutan dalam melakukan pengawasan. Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dilakukan oleh komite sekolah, sedangkan *supervise* dilakukan secara teratur dilakukan oleh kepala sekolah. Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya dalam waktu yang sudah ditetapkan bersama kepada kepala sekolah.

Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan harus menindaklanjuti setiap laporan yang diterimanya dan menggunakan hasil pemantauan atau pengawasan tersebut untuk memperbaiki kinerja sekolah dan sebagai sarana pendidikan.

a. Program Evaluasi

Jenis-Jenis Evaluasi:

- 1) Evaluasi diri adalah evaluasi yang dilakukan pihak sekolah untuk menilai kinerja sekolah itu sendiri. Pihak sekolah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Evaluasi diri atau evaluasi sekolah dilakukan secara periodik berdasarkan pada data dan informasi yang sah.
- 2) Evaluasi dan pengembangan kurikulum adalah proses yang dilakukan secara komprehensif dan fleksibel agar bisa menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir dan bersifat menyeluruh yang artinya melibatkan semua pihak.
- 3) Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga pendidik meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi harus memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan-perubahan peserta didik

b. Akreditasi sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk menentukan tingkat kelayakan suatu

sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Keempat, Kepemimpinan Sekolah/Madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 dijelaskan bahwa komponen kepemimpinan sekolah terdiri dari tanggung jawab pengelolaan dan tugas kepala sekolah. Apabila dicermati berdasarkan fungsinya, maka tanggung jawab pengelolaan sekolah dimiliki oleh kepala sekolah. Ia sebagai pemimpin tertinggi di lembaga itu dan dapat dibantu oleh minimal satu orang wakil kepala sekolah. Dalam aturan itu disebutkan bahwa wakil kepala sekolah dipilih oleh dewan pendidik, dan proses pengangkatan serta keputusannya, dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah kepada institusi di atasnya. Akan tetapi, dalam hal ini penulis memberikan catatan bahwa ketentuan tersebut bisa jadi hanya berlaku untuk sekolah negeri saja. Sedangkan sekolah swasta, praktik pemilihan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sangat ditentukan oleh aturan yayasan dan aturan internal sekolah itu sendiri.

Kepala sekolah sebagai supervisor berfungsi sebagai pengawas, pengendali, Pembina, pengarah, dan pemberi contoh bagi para guru dan karyawannya di sekolah. Dengan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar, maka seorang kepala sekolah harus memiliki kemampuan leadership yang cukup—profesional, trampil, berprilaku baik dan lain sebagainya. Dalam menjalankan tugas ini, kepala sekolah harus mumpuni dalam memimpin dan memiliki kedekatan dengan seluruh karyawan. Dalam konteks ini kreativitas kepala sekolah sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, membuat organisasi sekolah, memberikan pengarahannya, dan mengatur pembagian kerja. (Jamal Ma'mur Asmani, 2012)

Sebagai supervisor, kepala sekolah perlu melakukan koordinasi dengan bagian-bagian lain dalam melakukan kegiatan sekolah, baik berupa administrasi, tata kelola, bahkan sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolahnya. Kepala sekolah harus menghubungkan seluruh personal organisasi dengan tugas yang dilakukannya sehingga terjalin kesatuan, keselarasan, serta menghasilkan kebijaksanaan dan keputusan yang tepat. Tindakan pengoordinasian ini meliputi pengawasan, pemberian nilai, pengarahannya, dan bimbingan terhadap setiap personal organisasi dengan melibatkan pihak lain, seperti bimbingan dan konseling, guru yang menangani kurikulum, wali kelas, petugas tata usaha, BP-3, komite sekolah dan lain sebagainya. (Herabuddin, 2009)

Berkaitan dengan hal di atas, kepala sekolah atau pengawas perlu memperhatikan Prinsip-prinsip supervisi atau faktor-faktor di antaranya bersifat konstruktif, berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, sederhana dan informal dalam pelaksanaannya, aman dan nyaman bagi seluruh civitas akademik, berasaskan profesionalisme, mempertimbangkan kemungkinan prasangka guru-guru dan pegawai sekolah, tidak menekan secara berlebihan, tidak boleh berdasarkan sentimen pribadi, menyadari akan proses, dan hendaknya juga bersifat preventif, korektif dan kooperatif. (Chan & Sam, 2007; M. Ngalim Purwanto, 2002)

Mengacu pada sebelas butir prinsip di atas, jika benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan baik oleh kepala sekolah maupun penilik atau pengawas dapat diharapkan setiap sekolah akan memperlihatkan kemajuan yang lebih signifikan dan peningkatan mutu kearah yang lebih bermakna. Selain itu ada pula hal-hal yang turut mempengaruhi keberhasilan dari sebuah supervisi. Sebagaimana dijelaskan oleh Purwanto, keberhasilan dari tindakan supervisi turut dipengaruhi oleh faktor Lingkungan masyarakat tempat berada, Besar kecilnya sekolah, Tingkatan dan jenis sekolah, Keadaan guru dan pegawai yang ada da Kecakapan dan keahlian supervisor.

Pada prinsipnya setiap tenaga kependidikan harus disupervisi secara priodik dalam melaksanakan tugasnya, jika jumlah guru terlalu banyak, maka kepala sekolah dapat meminta bantuan wakilnya atau guru senior untuk membantu melaksanakan supervisi. Keberhasilan kepala sekolah sebagai supervisor antara lain dapat ditunjukkan oleh (a) Meningkatnya kesadaran tenaga kependidikan (guru) untuk meningkatkan kinerja, (b) Meningkatnya ketrampilan tenaga kependidikan (guru) dalam melaksanakan tugasnya (Mulyasa, 2003). Sedangkan dalam pasal 50 ayat 1, 2 dan 3 PP No. 19 Tahun 2007 menyatakan bahwa sebagai penanggungjawab atas pengelolaan pendidikan di pundak kepala sekolah, dan dalam melaksanakan tugasnya ditingkat SMP sederajat dibantu oleh minimal satu orang wakil kepala sekolah, sedangkan di tingkat SMA sederajat kepala sekolah dibantu minimal oleh tiga orang wakil kepala sekolah yang membidangi Akademik, sarana prasarana dan kesiswaan.

Kelima, Sistem informasi. Banyak pemikir dan praktisi dunia pendidikan telah memasukan sistem informasi menjadi bagian penting dalam standarisasi pengelolaan pendidikan. Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi yang serba komputerisasi dan bahkan juga telah berbagai digital. Sistem informasi manajemen diartikan sebagai sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi untuk para pengguna di sekolah, baik itu penguanya guru, tenaga pendidikan, siswa, orang tua, ataupun mitra luar sekolah. Dalam sistem informasi itu juga termuat berbagai hal yang dianggap penting, seperti sejarah sekolah, fasilitas yang dimiliki, prestasi siswa dan sekolah, laporan kinerja sekolah dan hal-hal lain. (Irawan dkk., 2016). Secara manajemen, sistem informasi manajemen adalah seperangkat sistem yang dipakai untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam hal pengelolaan sistem informasi ini, semua warga sekolah mempunyai tanggung jawab yang sama dengan melalui instruksi dari kepala sekolah.

Saat ini, sistem informasi menjadi sarana penting untuk komunikasi dan transparansi. Sistem informasi juga menjadi persyaratan dalam sinkronisasi data melalui pangkalan data sekolah dengan sistem yang telah dibuat oleh pemerintah. (Irawan dkk., 2016) Dengan adanya sistem informasi yang baik, maka data sekolah juga menjadi lebih baik. Sistem informasi berbasis web juga dapat membantu promosi sekolah sehingga mendapatkan calon murid yang selektif. Bahkan, saat ini, teknologi informasi telah berkembang sedemikian rupa dalam dunia pendidikan dengan adanya sistem pembelajaran elektronik atau sering disebut juga *electronic learning (e-learning)*. (Chandrawati, 2010; Hartanto, 2016) Terlepas dengan beragam kajian terhadap efektifitas e-learning dalam proses pembelajaran, namun kehadirannya juga bisa menjadi bagian solusi pada kondisi tertentu sehingga siswa dapat belajar atau mendapatkan materi pelajaran.

Kelima hal di atas telah menjadi bagian penting dalam proses standarisasi pendidikan nasional di Indonesia dan wajib diterapkan di sekolah dasar maupun menengah. Secara umum aturan yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut telah memuat hal-hal penting dalam upaya standarisasi pendidikan nasional. Namun, standar yang ditetapkan ini merupakan standar minimum yang harus dimiliki setiap sekolah. Apabila sekolah memiliki standar yang lebih tinggi dari ketentuan pemerintah, maka hal ini akan menjadi nilai lebih bagi sekolah itu sendiri. Nilai lebih tersebut juga akan sangat membantu dalam akreditasi sekolah.

Idealisme yang tertuang dalam peraturan seperti yang tertuang dalam Permendiknas ini masih belum maksimal antara *das sollen* dan *das sein*-nya. Dari beberapa penelitian terdahulu disebutkan beberapa kendala pelaksanaan supervise di sekolah, seperti kurangnya ghirah keilmuan guru, pemimpin yang kurang berwibawa, lemahnya kreativitas, mengedepankan formalitas, mengabaikan esensi, dan kurangnya fasilitas. (Aziz, 2016; Raharjo dkk., 2018; Wardani dkk., 2017) Adanya program akreditasi sekolah terkadang belum dimanfaatkan oleh sekolah oleh sekolah untuk meningkatkan

mutu pendidikannya. Bahkan, kesiapan untuk akreditasi terkadang hanya dilakukan menjelang akreditasi itu dilakukan.

4. PENUTUP

Uraian di atas memperjelas bahwa pengelolaan lembaga pendidikan di tingkat sekolah dasar ataupun menengah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai aturan turunan dari hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aturan ini menjadi dasar bagi pengelola pendidikan untuk diterapkan dengan baik, baik itu untuk sekolah di bawah Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Agama. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan perlakuan aturan terhadap dua sekolah tersebut karena standar pendidikan nasional mengacu pada aturan tersebut.

Muatan aturan ini secara filosofis juga sesuai dengan manajemen pendidikan modern dan dalam rangka menciptakan pendidikan baik, baik dari sisi pengelolaan maupun hasilnya. Dalam aturan tersebut, telah memuat standar minimal yang harus dipenuhi pengelola pendidikan mulai dari perencanaan program yang baik dan terukur, pelaksanaan rencana kerja yang efektif dan efisien, pengawasan dan evaluasi secara berkala, kepemimpinan yang mumpuni dan kredibel, sistem informasi yang baik di sekolah. Adanya ketimpangan dalam realitas pendidikan dasar dan menengah, antara sekolah negeri dan swasta, antara sekolah umum dan madrasa, antara sekolah di kota dan di desa, merupakan pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, F. (2014). Pendidikan Madrasah di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(1), 51–58.
- Annisa, A. (2018). *Implementasi Mutu Di Madrasah Tsanawiyah Muallimin Univa Medan* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Anwar, C. (2014). *Hakikat manusia dalam pendidikan: Sebuah tinjauan filosofis*. SUKA-Press.
- Anwar, H. (2017). Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Perspektif Pengelolaan Madrasah Aliyah Swasta. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 15–27.
- Aziz, I. (2016). Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Ibtidaiyah Kota Bukittinggi. *Jurnal Performa Olahraga*, 1(02), 131–146.
- Baharuddin, B. (2017). Pembentukan Karakter Siswa dan Profesionalisme Guru Melalui Budaya Literasi Sekolah. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 21–40.
- BANSM. (2017). *Instrumen Akreditasi SMA/MA 2017*. BANSM.
- BNSP. (2007). *Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. BNSP.
- Chan, S. M., & Sam, T. T. (2007). *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Rajagrafindo.
- Chandrawati, S. R. (2010). Pemamfaatan E-learning dalam Pembelajaran. *Jurnal Cakrawala Kependidikan*, 8(2).
- Faishal Haq, M. (2017). ANALISIS STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. *journal EVALUASI*, 1(1), 26. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v1i1.63>
- Hanun, F. (2015). Akreditasi Madrasah Sebagai Kunci Keberhasilan dalam Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 13(1).
- Hartanto, W. (2016). Penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 10(1).
- Herabuddin. (2009). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Pustaka Setia.

- Irawan, Y., Susanti, N., & Triyanto, W. A. (2016). Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Sekolah Berbasis Website Untuk Penyampaian Informasi Sekolah Dan Media Promosi Kepada Masyarakat. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, 7(1), 257–262.
- Jamal Ma'mur Asmani. (2012). *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah*. Diva Press.
- Komariah, A., & Triatna, C. (2006). *Visionary leadership menuju sekolah efektif*.
- Kurniadin, D., Machali, I., & Sandra, M. (2013). *Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*.
- M. Ngalim Purwanto. (2002). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 103.
- Mulyasa. (2003). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E., & Profesional, M. K. S. (2009). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Madrasah*. Cet ke-3. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurdin, D., & Sibaweh, I. (2015). *Pengelolaan Pendidikan Dari Teori Menuju Implementasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurochmah, A., Sutisnawati, A., & Wardana, A. E. (2019). Pengelolaan Satuan Pendidikan dalam Rangka Mencetak Insan Generasi Muda yang Unggul di Sekolah Dasar. *Jurnal Holistika*, 3(2), 73–80.
- Prabowo, S. L. (2008). *Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah*. UIN-Maliki Press.
- Raharjo, S. B., Yuliana, L., & Yudha, Y. H. (2018). Capaian standar nasional pendidikan sebagai prediktor mutu sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 3(2), 129–140.
- Wardani, K. W., Loekmono, L., & Supramono, S. (2017). Keterlaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sma Terakreditasi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1), 12–27.